

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Skripsi ini berusaha untuk mengungkap bagaimana Pulau Sebatik dan Kabupaten Nunukan menjadi arena dominasi ekonomi Malaysia melalui peredaran produk *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) ilegal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Isu ini mencerminkan kompleksitas relasi negara, pasar, dan masyarakat lokal dalam ruang lintas batas yang tidak sepenuhnya dapat dikontrol negara, dengan penggunaan mata uang Ringgit Malaysia (MYR) di pasar lokal pada transaksi sehari-hari, serta tenaga kerja lintas negara ilegal, serta sirkulasi barang yang sering berada di luar mekanisme regulasi formal.

Sebatik merupakan wilayah strategis di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang secara geografis terletak tepat di garis perbatasan Indonesia-Malaysia (Sabah). Sejarah awal kawasan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika penguasaan Borneo bagian utara oleh kekuatan kolonial Inggris melalui *British North Borneo Company*, serta pengaruh Kesultanan Sulu dan jaringan perdagangan maritim di Laut Sulawesi. Sebelum penegasan batas negara modern, Sebatik berkembang sebagai ruang interaksi sosial-ekonomi lintas etnis, terutama Bugis, Tidung, dan Melayu, yang menjadikan pulau ini sebagai simpul mobilitas dan perdagangan tradisional yang hidup dan cair dalam struktur sosialnya.

Periode pascakolonial memperlihatkan transformasi signifikan ketika perbatasan Indonesia-Malaysia ditetapkan secara lebih formal, terutama pasca

Konfrontasi 1963-1966. Sebatik menjadi salah satu wilayah yang mengalami pembelahan administratif, dengan sebagian masuk wilayah Indonesia, Nunukan dan sebagian lainnya berada di bawah Sabah, Malaysia. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas dalam kehidupan masyarakat perbatasan, termasuk pergeseran identitas, penggunaan mata uang ganda, serta intensitas interaksi lintas batas yang tetap tinggi meskipun terdapat regulasi negara. Studi-studi menunjukkan bahwa batas politik tidak serta-merta memutus jaringan sosial dan ekonomi yang telah terbentuk jauh sebelumnya, melainkan hanya merekonstruksi cara masyarakat beradaptasi dalam ruang perbatasan yang fleksibel.

Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nunukan dan pembangunan kawasan perbatasan Indonesia, di mana wilayah yang disebut sebagai “beranda depan negara” justru mengalami ketergantungan ekonomi terhadap negara tetangga. Ketergantungan ini diperparah oleh kedekatan geografis yang menjadikan integrasi ekonomi lintas negara sebagai solusi praktis atas minimnya aksesibilitas terhadap distribusi barang domestik (Kifli and Shafar 2019, 302). Akibatnya, pola interaksi spasial ini membentuk lanskap perbatasan yang lebih condong ke arah Tawau, Malaysia, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat setempat.

Dalam kebutuhan hariannya masyarakat perbatasan seringkali mengonsumsi produk-produk kebutuhan yang berasal dari ekonomi lintas batas yakni produk FMCG asal Malaysia. Produk FMCG sendiri merupakan produk yang mencakup seperti minyak goreng, gula, mie instan, susu, makanan ringan, deterjen, minuman kemasan, kosmetik hingga rokok Malaysia, yang menjadi bagian dari konsumsi

masyarakat perbatasan. Produk *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG) sendiri merupakan kategori barang konsumsi yang memiliki perputaran cepat di pasar, yang ditandai dengan frekuensi pembelian tinggi, harga relatif rendah, serta masa simpan yang singkat. Menurut Kotler dan Keller produk dengan tingkat konsumsi tinggi yang dibeli secara rutin oleh konsumen dan memiliki siklus hidup pendek dalam rantai distribusi utama FMCG terletak pada volume penjualan dan distribusi yang luas, bukan pada margin keuntungan per unit (Kotler and Keller 2016).

Dinamika sosial-ekonomi yang terjadi di kawasan Sebatik dan Nunukan menunjukkan bahwa wilayah perbatasan tidak hanya menjadi garis pemisah administratif antarnegara, tetapi juga ruang interaksi ekonomi transnasional yang berlangsung secara intensif. Kedekatan geografis Sebatik dengan Tawau, Sabah, menyebabkan arus barang konsumsi Malaysia masuk secara masif ke wilayah Indonesia. Namun, distribusi barang yang masuk secara masif ini merupakan ilegal karena tidak sesuai prosedur kepabean dan melanggar *Border Trade Agreement* (BTA) Indonesia-Malaysia.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Sebatik lebih terkoneksi dengan pusat ekonomi Malaysia dibandingkan pusat distribusi nasional Indonesia (Brata et al. 2020, 311). Secara historis, hubungan perdagangan antara masyarakat Sebatik, Nunukan, dan Tawau telah berlangsung sejak lama sebelum terbentuknya sistem pengawasan perbatasan modern. Aktivitas ekonomi lintas batas berkembang melalui hubungan kekerabatan, kedekatan budaya, dan mobilitas masyarakat pesisir yang bersifat tradisional. Kondisi ini menyebabkan perdagangan lintas batas tidak selalu dipahami sebagai aktivitas ilegal oleh masyarakat lokal,

melainkan sebagai mekanisme ekonomi sehari-hari yang telah mengakar secara sosial dan budaya, meskipun semakin lama ada indikasi bahwa terbentuk jaringan terorganisir yang memanfaatkan hal ini. Anuar dan Harun menjelaskan bahwa aktivitas perdagangan lintas batas di kawasan Tawau, Sebatik, dan Nunukan berkembang melalui keterlibatan masyarakat lokal dalam praktik penyelundupan barang yang berlangsung secara terus-menerus (Anuar and Harun 2019,).

Fenomena peredaran FMCG Malaysia ilegal di Sebatik dan Nunukan semakin meningkat karena faktor disparitas harga dan distribusi barang antara Indonesia dan Malaysia. Produk kebutuhan sehari-hari asal Malaysia dinilai lebih murah, mudah diperoleh, dan memiliki kualitas yang dianggap lebih baik dibanding produk domestik Indonesia. Sekitar 70% barang kebutuhan masyarakat Sebatik dipenuhi melalui perdagangan lintas batas dari Tawau, Malaysia (Kompas 2017). Di sisi lain, biaya logistik distribusi barang dari wilayah pusat Indonesia menuju Nunukan dan Sebatik relatif tinggi karena keterbatasan infrastruktur dan rantai distribusi nasional. Akibatnya, masyarakat lebih memilih produk Malaysia sebagai alternatif konsumsi utama

Pada dasarnya sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat perbatasan khususnya Sebatik masih dipenuhi melalui aktivitas perdagangan lintas batas dari Tawau, Malaysia. Bahkan dalam praktiknya, distribusi FMCG Malaysia dilakukan melalui pelabuhan tradisional dan jalur laut kecil atau “jalur tikus”. (Brata et al. 2020, 311). Situasi ini menyebabkan barang konsumsi asal Malaysia masuk tanpa prosedur resmi atau ilegal sehingga membentuk pola perdagangan informal lintas batas yang berlangsung secara terus-menerus serta adanya celah dalam sistem

pengawasan dan pengelolaan perbatasan oleh pemerintah Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan dan instansi-instansi terkait.

Praktik perdagangan ilegal atau semi-legal ini tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan dalam pasar serta berpotensi melemahkan kedaulatan ekonomi nasional, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai kapasitas Pemda dalam menegakkan kedaulatan dan mengelola wilayah perbatasan. Karena mobilisasi barang dengan mekanisme atau regulasi ilegal di perbatasan dapat merugikan negara terutama, berasal dari kasus penyelundupan seperti rokok ilegal, daging olahan, dan minuman beralkohol. Berdasarkan data dari tahun 2024-2025 Bea Cukai Nunukan memusnahkan barang ilegal hasil tegahan dengan total nilai sekitar Rp967,6 juta, yang sebagian besar merupakan barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakan, kimia pertanian, BBM, oli, kosmetik. Potensi kerugian negara dari bea masuk, PPN, dan PPh dari barang-barang ini diperkirakan mencapai Rp436 juta hanya dari satu rangkaian pemusnahan (KPPBC 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Sebatik dan Nunukan telah berkembang menjadi ruang ekonomi transnasional yang sulit dipisahkan dari pengaruh Malaysia. Masyarakat perbatasan tidak hanya mengonsumsi produk Malaysia, tetapi juga mulai membentuk orientasi ekonomi yang lebih terhubung dengan Tawau dibanding pusat ekonomi nasional Indonesia. Ketimpangan pembangunan infrastruktur yang mencolok antara kedua wilayah ini semakin mengukuhkan ketergantungan masyarakat setempat terhadap akses pasar luar negeri guna memenuhi kebutuhan hidup dasar (Kurniasih and

Umar 2022, 3). Berlangsungnya fenomena ini berkaitan dengan kebijakan *Border Trade Agreement (BTA)* antara Indonesia dan Malaysia dalam perjanjian tersebut pada awalnya bertujuan mempermudah perdagangan masyarakat perbatasan dalam skala kecil (Isabudin 2014) Namun dalam praktiknya, aturan tersebut sering dimanfaatkan untuk memasukkan barang dalam jumlah besar.

Fenomena dominasi produk FMCG Malaysia di Sebatik dan Nunukan merupakan bentuk dominasi yang tidak hanya dilakukan melalui kekuatan koersif negara, tetapi juga melalui persetujuan sosial (*consent*) yang dibangun melalui budaya, ekonomi, dan praktik keseharian masyarakat (Gramsci 1971, 57). Dalam hal ini, dominasi produk Malaysia diterima secara sosial karena dianggap mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dibanding distribusi produk domestik Indonesia.

Dominasi pasar Malaysia di kawasan perbatasan terlihat dari terbentuknya pola konsumsi masyarakat yang menjadikan produk Malaysia sebagai standar utama kebutuhan sehari-hari. Bahkan penggunaan mata uang ringgit dalam aktivitas perdagangan lokal juga menunjukkan kuatnya pengaruh ekonomi Malaysia terhadap masyarakat Sebatik dan Nunukan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa dominasi tidak selalu hadir melalui kontrol politik formal, melainkan melalui kemampuan menguasai ruang konsumsi masyarakat (Haryaningsih and Patriani 2021, 307).

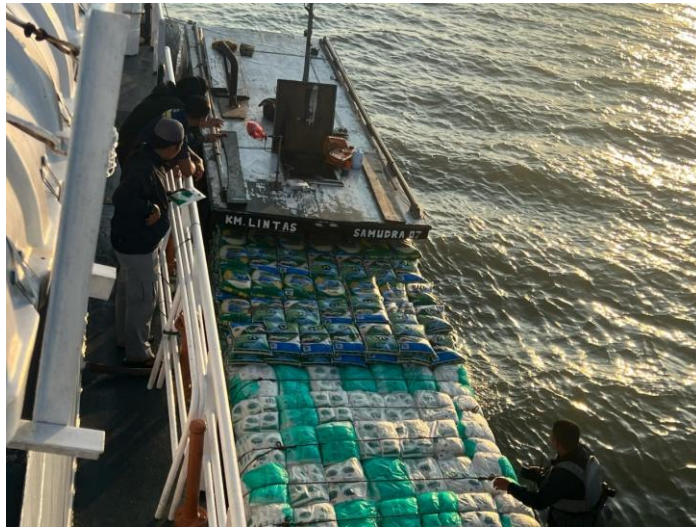
Masyarakat menerima dominasi FMCG Malaysia sebagai sesuatu yang normal karena negara belum mampu menghadirkan alternatif distribusi yang kompetitif. Dengan demikian, dominasi produk Malaysia tidak hanya

mencerminkan persoalan ekonomi, tetapi juga menunjukkan proses hegemonik yang bekerja dalam kehidupan sosial masyarakat perbatasan. Dalam perspektif *Border Governance*, perbatasan dipahami sebagai ruang yang melibatkan interaksi antara negara, pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku ekonomi, dan masyarakat lokal dalam mengelola mobilitas manusia maupun barang lintas batas (Seran, 2019, 175). Oleh karena itu, pengelolaan perbatasan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan keamanan semata.

Peredaran FMCG ilegal di Sebatik tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran ekonomi, melainkan sebagai konsekuensi dari struktur sosial, ketimpangan dan Infrastruktur distribusi logistik Indonesia yang terbatas menyebabkan masyarakat lebih memilih jalur ekonomi Malaysia yang dianggap lebih efisien (Kurniasih and Umar 2022, 3). Oleh sebab itu aktivitas ekonomi lintas batas sering berkembang menjadi ekonomi informal ketika regulasi negara tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Akibatnya, masyarakat menciptakan mekanisme perdagangan sendiri yang dianggap lebih efisien dibanding sistem formal negara. dalam banyak kasus, barang-barang kebutuhan pokok dari Malaysia khususnya di daerah yang masih sangat sulit aksesnya, justru menjadi penopang utama kehidupan masyarakat Perbatasan.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI melaporkan bahwa terdapat penyelundupan 19 ton beras dan gula pasir bersubsidi asal Malaysia di perairan Sei Nyamuk, Sebatik, Kabupaten Nunukan (Bakamla RI 2025).

Gambar 1.1 Penyeludupan 19 ton Gula dan Beras Malaysia di Sebatik



Sumber: Humas Bakamla RI, 2025

Oleh karena masifnya penyeludupan ini, instansi-instansi terkait lainnya sebaiknya dapat memperkuat pengawasan terhadap arus barang ilegal dari Malaysia. Namun demikian, perlunya juga kerjasama dengan Pemerintah Daerah Nunukan karena Pemda memahami sosial ekonomi masyarakatnya dan dapat berkordinasi dengan Pemerintah Pusat. Karena, produk FMCG Malaysia tanpa cukai tetap beredar luas di pasar tradisional Sebatik dan Nunukan.

Permasalahan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan keamanan negara dengan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal. Negara memandang perdagangan tanpa cukai sebagai pelanggaran hukum dan ancaman terhadap kedaulatan ekonomi nasional, sementara masyarakat melihat aktivitas tersebut sebagai mekanisme ekonomi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Brata et al. 2020, 312).

Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan memiliki posisi strategis dalam mengelola dinamika perdagangan lintas batas tersebut. Sebagai aktor lokal, pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab terhadap stabilitas ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi representasi negara dalam menjaga kedaulatan dan perekonomian wilayah perbatasan.

Persoalan perdagangan lintas batas tidak dapat dipahami semata-mata sebagai masalah hukum, melainkan persoalan kesejahteraan dan ketimpangan pembangunan wilayah perbatasan (Pala and Zamili 2023, 218). Oleh karena itu, isu ini sebaiknya mendapat perhatian khusus dan tidak dapat “dibiarkan” secara terus menerus. Dominasi FMCG Malaysia juga berdampak terhadap lemahnya daya saing produk lokal Indonesia di wilayah perbatasan. Produk domestik sering kali kalah dari segi harga, kualitas distribusi, dan aksesibilitas dibanding barang Malaysia (Iswanto et al. 2020, 6).

Kondisi ini menyebabkan pasar lokal Sebatik dan Nunukan dipenuhi produk asing yang secara perlahan menggeser posisi produk nasional dalam konsumsi masyarakat sehari-hari (Raharjo dan Anuar 2022, 12). Selain berdampak terhadap ekonomi lokal, peredaran FMCG tanpa cukai juga berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai. Barang-barang yang masuk melalui jalur informal tidak tercatat dalam sistem perdagangan resmi sehingga menyebabkan hilangnya potensi pendapatan negara.

Fokus utama penelitian ini terletak pada tata kelola perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam mengendalikan peredaran produk FMCG Malaysia ilegal di wilayah Sebatik dan Nunukan. Permasalahan ini terus

berlangsung tidak hanya karena faktor geografis dan ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap Malaysia, tetapi juga didukung oleh adanya jaringan perdagangan terorganisir yang memanfaatkan celah. Akibatnya, hal ini terus membuka ruang bagi jaringan perdagangan lintas batas untuk terus berkembang dan mempertahankan dominasi produk Malaysia di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, peredaran produk FMCG Malaysia ilegal di wilayah Sebatik dan Nunukan menunjukkan bahwa perdagangan lintas batas informal masih berlangsung secara masif dan didukung oleh ketergantungan masyarakat terhadap produk Malaysia. Kondisi ini memerlukan koordinasi Pemda Kabupaten Nunukan dan instansi vertikal lainnya dalam berkoordinasi, mengawasi distribusi barang lintas negara, mengelola aktivitas ekonomi perbatasan, serta mengurangi dominasi pasar Malaysia di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Oleh karena itu, skripsi ini berupaya mengkaji bagaimana praktik tata kelola perbatasan Pemda Kabupaten Nunukan dijalankan dalam menghadapi perdagangan lintas batas informal sehingga dominasi peredaran FMCG Malaysia ilegal masih terus berlangsung di wilayah Kabupaten Nunukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana tata kelola perbatasan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam menghadapi

perdagangan lintas batas informal berupa dominasi peredaran produk FMCG Malaysia tanpa cukai di wilayah Nunukan dan Sebatik perbatasan Indonesia-Malaysia, serta menguraikan bentuk dominasi ekonomi Malaysia melalui produk kebutuhan sehari-hari yang memengaruhi pola konsumsi masyarakat perbatasan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya, dan praktiknya pemerintah daerah dalam mengelola tata kelola perbatasan di tengah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap produk FMCG Malaysia, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai dominasi ekonomi dan efektivitas *Border Governance* di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memahami dinamika aktivitas ekonomi lintas batas di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, di Kabupaten Nunukan dan Sebatik. Fenomena dominasi produk FMCG Malaysia yang beredar di wilayah tersebut tanpa melalui mekanisme cukai yang semestinya dan tersebar hingga ke Sulawesi menunjukkan adanya kompleksitas dalam tata kelola perdagangan lintas batas. Oleh karena itu, penelitian diharapkan mampu mengungkap bagaimana *Border Governance* Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam menghadapi aktivitas ekonomi tersebut serta menjelaskan dinamika dominasi produk Malaysia yang berkembang di tengah masyarakat perbatasan serta dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana interaksi ekonomi lintas batas dapat mempengaruhi struktur pasar lokal,

perilaku konsumsi masyarakat, serta relasi kekuasaan ekonomi di wilayah perbatasan.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam studi *Border Governance*, ekonomi informal transnasional (*transnational informal economy*), serta relasi negara dan masyarakat di kawasan perbatasan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa perbatasan tidak hanya dipahami sebagai batas teritorial dan instrumen keamanan negara, tetapi juga sebagai ruang sosial-ekonomi transnasional yang dipengaruhi oleh interaksi aktor lokal, pasar lintas negara, dan kebijakan pemerintah daerah. Kasus Sebatik dan Nunukan menunjukkan bahwa praktik perdagangan lintas batas informal tidak dapat dijelaskan semata-mata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai konsekuensi dari ketimpangan pembangunan, keterbatasan distribusi ekonomi nasional, serta tingginya ketergantungan masyarakat terhadap akses ekonomi Malaysia.

Penelitian ini juga memperkaya kajian *Border Governance* dalam Hubungan Internasional dengan menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor penting dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Selama ini, studi perbatasan cenderung berfokus pada negara sebagai aktor utama melalui pendekatan keamanan dan kedaulatan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perbatasan di tingkat lokal memiliki peran signifikan dalam menentukan efektivitas pengawasan,

pengendalian perdagangan lintas batas, serta pengelolaan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif mengenai *Border Governance* yang tidak hanya bersifat state-centered, tetapi juga melibatkan dinamika hubungan antara pemerintah daerah, aparat negara, pelaku ekonomi informal, dan masyarakat lokal.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam kajian ekonomi informal transnasional dengan menunjukkan bagaimana jaringan perdagangan lintas batas di Sebatik berkembang secara terorganisir dan berkelanjutan melalui jalur informal yang memanfaatkan kedekatan geografis, hubungan sosial masyarakat perbatasan, serta lemahnya pengawasan distribusi barang. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas ekonomi informal di wilayah perbatasan tidak hanya bersifat subsisten, tetapi telah berkembang menjadi mekanisme distribusi komersial yang memengaruhi struktur pasar lokal dan pola konsumsi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami dinamika perdagangan informal lintas negara di kawasan perbatasan Asia Tenggara, khususnya pada konteks hubungan Indonesia-Malaysia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan serta instansi terkait dalam memperkuat *Border Governance* dan pengawasan terhadap peredaran produk FMCG Malaysia ilegal atau tidak sesuai regulasi resmi di wilayah

perbatasan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat perbatasan sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang lebih efektif dan berbagai tantangan pengelolaan perbatasan, khususnya terkait ketergantungan masyarakat terhadap produk Malaysia dan lemahnya distribusi produk domestik Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam penguatan ekonomi perbatasan, pengawasan perdagangan lintas batas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sebatik dan Nunukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam enam bab yang saling berkesinambungan, dengan sub-bab yang menyesuaikan arah pembahasan utama penelitian. Bab pertama dari penelitian ini menguraikan latar belakang penelitian yang menekankan fenomena peredaran produk FMCG Malaysia ilegal atau tidak sesuai dengan Perjanjian *Border Trade Agreement (BTA)* Indonesia-Malaysia. Di dalamnya juga termuat pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis, serta sistematika penulisan.

Kemudian bab kedua menyajikan revid literatur yang menegaskan kebaruan penelitian sekaligus memperlihatkan posisi studi ini dalam khazanah keilmuan hubungan internasional. Selanjutnya dibahas kerangka teori dan konsep yang relevan, serta hipotesis. Bagian ini juga memuat metode penelitian yang terdiri atas

ruang lingkup penelitian, jenis dan tipe penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik validasi data, serta teknik analisis data.

Bab ketiga membahas menjelaskan mengenai tata kelola perbatasan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam menghadapi perdagangan lintas batas informal yang didominasi peredaran produk FMCG Malaysia ilegal di wilayah Sebatik, serta menganalisis peran dan upaya yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengelola tata kelola perbatasan.

Bab keempat peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai praktik tata kelola yang dijalankan Pemda dengan intansi terkait yang membentuk pasar produk Malaysia melalui produk FMCG ilegal di Sebatik dan Nunukan, serta menganalisis bagaimana ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap produk Malaysia direproduksi melalui perdagangan lintas batas informal dan dampaknya terhadap tata kelola perbatasan.

Bab terakhir merupakan kesimpulan yang merangkum temuan utama penelitian terkait tata kelola pemerintah daerah kabupaten nunukan dalam menghadapi dominasi *Produk Fast Moving Consumer Goods (FMCG)* Malaysia ilegal. Bab ini juga menyajikan rekomendasi, baik untuk pengembangan kajian akademis maupun bagi pembuat kebijakan dalam mengelola wilayah perbatasan secara lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal.